

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada Bab “Pemberdayaan LPMK Lamper Kidul dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, peran LPMK Lamper Kidul dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Tahap identifikasi awal menunjukkan bahwa LPMK lebih banyak berfungsi sebagai koordinator formal melalui forum RT/RW dan kelurahan, sedangkan keterlibatan langsung dalam penggalan aspirasi serta kebutuhan masyarakat masih terbatas. Peran LPMK lebih menekankan pada penyaluran informasi ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dibandingkan menghadirkan ruang partisipasi yang inklusif di tingkat lokal.

Tahap perencanaan cenderung bersifat seremonial dengan keterlibatan LPMK yang terbatas. Mekanisme perencanaan, pembagian dana, dan penggunaan anggaran tidak disampaikan secara transparan, sehingga memperlebar jarak antara prinsip partisipatif dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Aksesibilitas lembaga yang rendah serta keluhan internal pengurus semakin menegaskan lemahnya fungsi LPMK sebagai wadah aspirasi masyarakat yang terbuka dan dapat dipercaya.

Tahap pelaksanaan menunjukkan adanya kendala komunikasi internal, keterbatasan sosialisasi, dan eksklusivitas kegiatan yang hanya melibatkan kelompok tertentu. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakjelasan peran LPMK dalam penanganan persoalan sosial, serta terbentuknya persepsi bahwa program pemberdayaan lebih menekankan formalitas dibandingkan pemenuhan kebutuhan nyata warga.

Tahap evaluasi, mitigasi, dan pengendalian tidak dilaksanakan secara sistematis oleh LPMK Lamper Kidul. Ketiadaan forum komunikasi dan instrumen evaluasi menyebabkan lemahnya upaya mitigasi serta tidak adanya mekanisme pengendalian yang dapat menjamin keberlanjutan program. Situasi ini memperlebar jarak antara LPMK dengan masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa keberadaan lembaga tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah warga.

Keseluruhan temuan menegaskan bahwa LPMK Lamper Kidul belum mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hambatan utama meliputi lemahnya kapasitas internal, ketidaktransparanan mekanisme perencanaan, keterbatasan komunikasi, minimnya sosialisasi, serta absennya evaluasi sistematis. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lamper Kidul pada akhirnya cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.

## 4.2 Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil simpulan maka dapat diberi saran dan masukan yang di antaranya sebagai berikut;

- a. Untuk mengoptimalkan peran LPMK Lamper Kidul dalam mendorong partisipasi warga dan pemberdayaan, hendaknya LPMK Lamper Kidul melakukan pendekatan yang lebih proaktif, transparan, dan partisipatif. Selain itu, berdasarkan fungsi LPMK sebagai mitra pemerintah LPMK Lamper Kidul hendaknya mampu menggerakkan swadaya gotong royong
- b. Masalah perencanaan pembangunan yang bersifat seremonial dan keterlibatan LPMK yang terbatas seringkali disebabkan oleh pendekatan *top-down* dan kurangnya partisipasi aktif. Oleh karena itu, kelurahan/kecamatan perlu memfasilitasi pelatihan bagi pengurus LPMK

Lamper Kidul terkait pemetaan potensi wilayah, teknik perencanaan, dan analisis kebutuhan masyarakat.

- c. Pada tahap pelaksanaan program pemberdayaan, LPMK Lamper Kidul hendaknya lebih melibatkan warga dalam pemetaan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, sehingga program lebih berbasis pada kebutuhan riil, bukan formalitas.
- d. LPMK Lamper Kidul hendaknya melakukan evaluasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat, menggunakan survei atau diskusi kelompok untuk mendapatkan umpan balik yang jujur tentang hasil program.